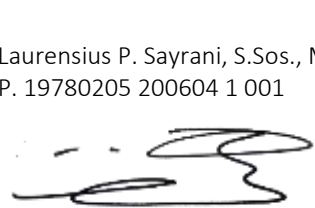
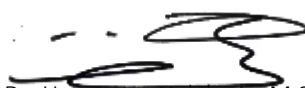




UNIVERSITAS NUSA CENDANA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

--/--/--/
P, S2-PIPS PPS
Undana

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Good Governance & Civil Society	MIPS2125	PIPS	T=2	P=0	II	4 – 1 – 2024
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
 Dr. Karolus Kopong Medan, M.Hum NIP. 19620422 199003 1 001	 Dr. Laurensius P. Sayrani, S.Sos., M.Si NIP. 19780205 200604 1 001		 Dr. Hikmah, M.Pd NIP. 19610409 198803 1002		 Dr. Hamza H. Wulakada, M.Si NIP. 19810307 200912 1002	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-1	Menunjukkan pemahaman komprehensif tentang konsep, prinsip, dan praktik Good Governance & Civil Society dalam konteks global, nasional, dan lokal (termasuk NTT).				
	CPL-2	Mampu menjelaskan secara kritis konsep teori governance, partisipasi publik, demokrasi, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hak warga negara, dan peran masyarakat sipil.				
	CPL-3	Mampu mengomunikasikan gagasan akademik dan praktis terkait implementasi Good Governance & Civil Society dalam penyelesaian masalah sosial kontemporer.				
	CPL-4	Mampu mendiseminasikan gagasan, hasil kajian, dan rekomendasi kebijakan terkait Good Governance & Civil Society kepada masyarakat akademik dan publik.				
	CPL-5	erampil merancang bahan ajar, analisis kebijakan, dan model pemberdayaan masyarakat berbasis prinsip governance dan penguatan civil society.				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK	1. Menganalisis konsep, teori, serta paradigma Good Governance & Civil Society secara kritis. 2. Mendeskripsikan secara sistematis praktik governance dan dinamika masyarakat sipil di Indonesia dan khususnya di Provinsi NTT. 3. Menganalisis kontribusi, peran, dan tantangan civil society dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, serta perlindungan hak warga. 4. Menguji dan merumuskan potensi implementasi konsep Good Governance & Civil Society dalam penyelesaian persoalan sosial, kebijakan publik, dan pembangunan daerah. 5.				

	CPL & Sub-CPMK
	Sub-CPMK-1: Memiliki karakter, etika, integritas, sikap humanis, toleran, demokratis, serta menjunjung nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam praktik governance.
	Sub-CPMK-2: Mampu memanfaatkan teknologi informasi, data sosial, dan literasi digital untuk mendukung analisis governance, transparansi publik, serta advokasi masyarakat sipil.
	Sub-CPMK-3: Mampu menerapkan metode, pendekatan, dan keterampilan analisis dalam kajian Good Governance & Civil Society.
	Sub-CPMK-4: Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan isu-isu kontemporer seperti korupsi, ketimpangan, kemiskinan, gender, HAM, migrasi, perubahan iklim, serta problem pembangunan di NTT melalui perspektif governance.
	Sub-CPMK-5: Mampu merancang dan melaksanakan penelitian kebijakan, kajian sosial, serta analisis implementasi governance di lapangan secara ilmiah, termasuk menginterpretasi data empiris.
	Sub-CPMK-6: Mampu merancang model tata kelola, kebijakan publik, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, budaya lokal, etika, serta keberlanjutan.
	Sub-CPMK-7: Mampu menyusun ide, argumentasi ilmiah, policy brief, dan rekomendasi kebijakan secara bertanggung jawab sesuai etika akademik, serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat akademik dan publik.
	Sub-CPMK-8: Mampu merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kerja akademik/profesional secara mandiri maupun kolaboratif lintas sektor, disiplin, dan budaya.
	Sub-CPMK-9: Memiliki kesadaran pembelajaran sepanjang hayat, kepekaan sosial, jiwa kepemimpinan transformasional, serta wawasan kontemporer untuk mendukung tata kelola dan penguatan civil society ke depan.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, paradigma, serta praktik Good Governance & Civil Society , meliputi: definisi, ruang lingkup, prinsip transparansi, akuntabilitas, rule of law, partisipasi masyarakat, demokrasi, dan inklusivitas; dinamika hubungan negara–pasar–masyarakat sipil; peran NGO/LSM, organisasi keagamaan, komunitas adat, dan institusi sosial dalam tata kelola publik. Mata kuliah ini juga mengkaji isu kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan, korupsi, perlindungan sosial, gender, HAM, migrasi tenaga kerja, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya, serta praktik governance pada level lokal khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mendorong mahasiswa mampu merumuskan solusi dan kontribusi berbasis riset dan pemberdayaan masyarakat

Pert	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Penilaian		Bentuk Pembelajaran		Sub-CPMK [sebagai kemampuan akhir yang diharapkan]	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & bentuk	Luring	Daring		
1	Kontrak Belajar & Pengantar Good Governance & Civil Society	Memahami capaian, ruang lingkup, urgensi governance & civil society	Non tes, refleksi, diskusi	Ceramah dan Diskusi	https://edlink.id/setup	Memahami konsep dasar dan tujuan pembelajaran	5%
2	Konsep & Teori Good Governance	Ketepatan analisa teori governance	Non tes & tugas ringkas	Ceramah dan Diskusi	https://edlink.id/setup	Memahami teori governance	5%
3	Civil Society: Konsep, Aktor, Dinamika	Analisis peran masyarakat sipil	Penugasan & diskusi	Diskusi dan PBL	https://edlink.id/setup	Menganalisis peran civil society	10%
4	Demokrasi, Partisipasi Publik & Tata Kelola	Ketepatan mengaitkan teori–praktik	Presentasi & simulasi	Diskusi dan PBL	https://edlink.id/setup	Mengidentifikasi bentuk partisipasi	15%
5	Governance dalam Pendidikan & Sektor Sosial	Ketepatan analisis kasus pendidikan (khususnya NTT)	Penugasan & kuis	Discovery learning, kolaboratif	https://edlink.id/setup	Menerapkan analisis governance	5%
6	Transparansi, Akuntabilitas & Anti Korupsi	Analisis kritis permasalahan korupsi publik	Presentasi & tugas	Discovery learning, kolaboratif	https://edlink.id/setup	Memahami penguatan integritas publik	5%
7	Governance Desa, Adat & Local Wisdom	Ketepatan analisa & relevansi lokal NTT	Presentasi & simulasi	Discovery learning, kolaboratif	https://edlink.id/setup	Mengaitkan governance dengan budaya lokal	5%
8	Ujian Tengah Semester	Evaluasi I	Tes tertulis	Tes tertulis	https://edlink.id/setup	Ketuntasan awal	50
9	Governance dalam Isu Kemiskinan, Ketimpangan & Perlindungan Sosial	Analisis penyebab & solusi	Tugas, kuis, presentasi	Discovery learning, kolaboratif	https://edlink.id/setup	Menganalisa isu kemiskinan & ketimpangan	5%
10	Gender, HAM & Inklusi Sosial	Analisis kebijakan berbasis keadilan	Penugasan & diskusi	Discovery learning	https://edlink.id/setup	Menganalisa isu gender & HAM	5%
11	Governance & Migrasi Tenaga Kerja / Perdagangan Orang (khusus NTT)	Analisis strategi penanganan	Non tes & penugasan	Ceramah dan Diskusi	https://edlink.id/setup	Menganalisa isu migrasi & perlindungan warga	5%
12	Digital Governance & Peran Media Sosial Warga	Ketepatan menganalisa digital citizenship	Non tes & diskusi	Ceramah dan Diskusi	https://edlink.id/setup	Memahami peran teknologi governance	5%
13	Disaster Governance & Climate Resilience	Analisis penanganan bencana (contoh Seroja)	Non tes & simulasi	Dinamika kelompok	https://edlink.id/setup	Menganalisa governance kebencanaan	5%

14	Studi Kasus: Governance pada Investasi, Pariwisata & Konflik Kepentingan	Solutif dan konstruktif	PBL & presentasi	Diskusi	https://edlink.id/setup	Mendesain model pendampingan kebijakan	10%
15	Studi Kasus Implementasi Civil Society Movement	Ketuntasan membedah kasus	PBL & presentasi	PBL dan kolaboratif	https://edlink.id/setup	Mendesain model penguatan civil society	15%
16	Ujian Akhir Semester	Evaluasi Akhir	Tes Tertulis dan Penugasan		https://edlink.id/setup	Ketuntasan Akhir	100%

RENCANA EVALUASI

Basis Evaluasi	Bobot	Komponen Evaluasi	Instrumen	Deskripsi
Aktivitas dan Partisipasi	10	Diskusi dan Laporan kelompok	Lembaran pemantauan & rubrik observasi	Aktif dan partisipatif dalam pembelajaran; mengemukakan pendapat dengan argumen ilmiah; responsif terhadap isu governance & civil society
Kolaborasi dan Kerjasama	15	Kerja tim dalam tugas kelompok / studi kasus	Lembatan pemantauan	Toleran, terbuka terhadap masukan, mampu bekerja lintas latar belakang, menunjukkan etika kolaborasi
Solusi dan Konstruktif	10	Laporan analisis & refleksi kritis	Lembatan pemantauan	Mampu menyampaikan gagasan inovatif, kritis, dan memberikan solusi konstruktif atas permasalahan governance di Indonesia & NTT
Hasil Proyek	15	Reportase/studi kasus kebijakan publik, governance desa, civil society	Lembatan pemantauan	Disiplin waktu, akurasi data, kelengkapan rujukan, ketepatan metodologi, ketajaman analisis, kebermaknaan hasil
Kognitif/Pengetahuan	10	Tugas	Lembaran Tugas, panduan penilaian dan kunci jawaban	Mampu mengerjakan tugas sesuai instruksi; menunjukkan pemahaman teori governance & civil society
	5	Kuis	Lembaran Kuis, panduan penilaian dan kunci jawaban	Disiplin, cepat & tepat merespon pertanyaan; memahami materi inti perkuliahan
	15	Ujian Tengah Semester	Lembaran Ujian, panduan penilaian dan kunci jawaban	Menyelesaikan soal sesuai Sub-CPMK; berbasis referensi ilmiah, analisis kritis & argumentasi logis
	20	Ujian Akhir Semester	Lembaran Ujian, panduan penilaian dan kunci jawaban	Menjawab sesuai Sub-CPMK; menunjukkan penguasaan konsep, kemampuan analisis kebijakan, serta penerapan governance & civil society pada kasus nyata, termasuk konteks NTT

REFERENSI

Buku:

1. "Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). *Village governance, community life and the 2014 Village Law in Indonesia*. SMERU Research Institute.
2. Cornwall, A., & Coelho, V. S. P. (Eds.). (2007). *Spaces for change? The politics of participation in new democratic arenas*. Zed Books.
3. Cox, R. W. (1999). *Civil society at the turn of the millennium: Prospects for an alternative world order*. United Nations University Press.

4. Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
5. Edwards, M. (2004). *Civil society*. Polity Press.
6. Fukuyama, F. (2013). *The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution*. Farrar, Straus and Giroux.
7. Gaventa, J., & Tandon, R. (2010). *Globalizing citizens: New dynamics of inclusion and exclusion*. Zed Books.
8. Hyden, G., Court, J., & Mease, K. (2004). *Making sense of governance: Empirical evidence from sixteen developing countries*. Lynne Rienner Publishers.
9. Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
10. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
11. Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics, and the state*. Macmillan.
12. Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). *Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan*. Rajawali Pers.
13. Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
14. Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
15. Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). *What is quality of government? A theory of impartial government institutions*. Cambridge University Press.
16. UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
17. World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank.

Artikel Ilmiah:

1. Ackerman, J. M. (2004). Co-governance for accountability: Beyond “exit” and “voice.” *World Development*, 32(3), 447–463. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.06.015>
2. Aldrich, D. P. (2012). Building resilience: Social capital in post-disaster recovery. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269.
3. Andrews, M. (2013). Explaining positive deviance in public sector reforms in development. *World Development*, 74, 197–207.
4. Bebbington, A., Hickey, S., & Mitlin, D. (2008). Can NGOs make a difference? The challenge of development alternatives. *Development in Practice*, 18(4–5), 505–519.
5. Cornwall, A., & Gaventa, J. (2001). From users and choosers to makers and shapers: Repositioning participation in social policy. *IDS Bulletin*, 31(4), 50–62. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp31004006.x>
6. Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
7. Fung, A., & Wright, E. O. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 29(1), 5–41.
8. Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x>
9. Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.
10. Holmes, R. (2019). Gender and governance: Understanding gender-responsive governance. *Gender & Development*, 27(3), 467–480.
11. Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing development: Does participation work? *Policy Research Report, World Bank*.
12. Miguel, E. (2004). Tribe or nation? Nation building and public goods in Kenya versus Tanzania. *World Politics*, 56(3), 327–362.
13. O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126.
14. Pierre, J. (2014). Can urban regimes travel in time and space? *Urban Affairs Review*, 50(6), 864–889.
15. Putra, A., & Pramusinto, A. (2019). Good governance in Indonesian local government: Progress and challenges. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 145–160.
16. Setiyono, B., & McLeod, R. (2010). Civil society organisations' contribution to the anti-corruption movement in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(3), 347–370.
17. Transparency International. (2022). *Global corruption report: Governance and accountability*. Transparency International.
18. UN Women. (2020). *Gender and inclusive governance report*. United Nations.
19. Wahyudi, A., & Djalante, R. (2020). Disaster governance in Indonesia: Learning from the 2018 disasters. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 50, 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101-112>
20. Wijayanto, P. (2013). Anti-corruption reform in Indonesia: Analyzing civil society engagement and political settlement. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32(3), 139–165.